

## DAFTAR REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Ali. (2005). *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dibidang Kepemilikan Tanah*. Jakarta: Komnas Ham.
- Amiruddin. & Zainal Asikin. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Boedi Harsono. (2002). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Effendy Perangin. (2005). *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hendra Arjunda. & Atika Thahira. (2021). *Kumpulan Catatan Pengertian Dasar Tentang Hukum*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Hilman Hadikusuma. (1995). *Metode Pembuatan Kertas kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Kartasapoetra. (1991). *Hukum Tanah, Jaminan bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Mudakir. (2004). *Model Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum di DKI Jakarta*. Jakarta: Media Jaya.
- Parlindungan, A.P. (1999). *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Keempat. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Rusmadi Murad. (2007). *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan*. Bandung: Mandar Maju.
- Siahan. (2003). *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Teori dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. & Sri Mahmudji. (2018). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. (2007). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD*. Bandung: Alfabeta.
- Kahar. (2016). Penataan Ruang Wilayah Pesisir dan Laut dalam Perspektif Hukum dan Keadilan. *Journal of Law, Policy and Globalization*. Vol. 2 No. 1.
- Muhammad Ilham Arisaputra. (2015). Penguasaan Tanah Pantai dan Wilayah Pesisir di Indonesia. *Perspektif Hukum*. Vol. 15 No. 1.
- Murni. (2020). Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 6, No. 2.
- Sukirno. (2010). Kebijakan Ego Sektoral dan Rendahnya Implementasi Hukum Sebagai Pemicu Konflik Tanah Hak Ulayat. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 39, No. 1.
- Wacipto Setiadi. Muhammad Arafah Sinjar. & Heru Sugiono. (2019). Pusat

Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 8 No. 1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir.

Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna. <https://kab-natuna.atrbpn.go.id/>. diakses pada tanggal 30 Juni 2024 pukul 11.25 WIB.

Wikipedia. [https://id.wikipedia.org/wiki/Bunguran\\_Timur,\\_Natuna](https://id.wikipedia.org/wiki/Bunguran_Timur,_Natuna). Diakses pada tanggal 12 Juli 2024 pukul 20.05 WIB.